

ANALISIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Deitje D. Mautang¹, Rosalina A.M. Koleangan², George M.V. Kawung³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di tingkat pemerintah desa maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan atas belanja dana desa. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah dana desa tersebut telah dibuat berdasarkan prioritas pembangunan dan menilai aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan praktik tata kelola yang bersih (good governance) dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengelolaan dan pemanfaatan dana desa serta hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penganggaran. Begitu juga secara parsial anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran, sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran dan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan efektif karena semua hasil berpengaruh signifikan. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa tanpa adanya anggaran desa maka kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan di desa akan sangat terbatas. Kemudian setelah tersediannya dana desa maka sumber daya manusia yang akan mengelola dan sistem informasi yang digunakanpun sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa oleh desa-desa di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi itu sendiri bisa menjadi hambatan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Keuangan Desa*

ABSTRACT

In supporting the creation of good governance, and clean government at the village government level, it is necessary to supervise and audit the expenditure of village funds. This is done to assess whether the village funds have been made based on development priorities and assess economic aspects, efficiency, effectiveness, and compliance with laws and regulations. Accountability and transparency, which are the manifestations of good governance practices in the management of central and regional government finances as a public sector organization, are important objectives of accounting reform and public sector administration. This study aims to look at the management and utilization of village funds as well as obstacles in the management and utilization of village funds in Pasan District. The method used is descriptive qualitative research method. The results of the study show that the budget, human resources and information systems simultaneously influence the effectiveness of budgeting. Likewise partially the budget has a significant effect on the effectiveness of budgeting, human resources have a significant effect on the effectiveness of budgeting and information systems have a significant effect on the effectiveness of budgeting. The management and utilization of village funds in Pasan sub-district is effective because all results have a significant effect. From the results of this study it can be seen that without a village budget, the capacity of the village government to carry out development in the village will be very limited. Then after the availability of village funds, the human resources that will manage and the information system that is used are very important in managing and utilizing village funds by villages in Pasan District, Southeast Minahasa Regency. So the budget, human resources and information systems themselves can become obstacles to the management and utilization of village funds in Pasan Sub-district.

Keywords: *Village Fund Management, Village Finance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat memperhatikan pembangunan desa. Dalam Kabinet Kerja mereka mengeluarkan Sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan istilah Nawacita. Salah satu agenda prioritas ke-3 Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nawacita ketiga ini terbukti dengan adanya realisasi dana untuk pembangunan desa melalui dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara yang akan datang (Ismail, dkk 2016:325).

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di tingkat pemerintah desa maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan atas belanja dana desa. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah dana desa tersebut telah dibuat berdasarkan prioritas pembangunan dan menilai aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintahan yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung : warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan.

Untuk pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mudah namun memerlukan sistem yang juga harus dibuat secara profesional. Mulai dari segi perencanaan, desa harus membentuk musyawarah desa untuk menentukan belanja bagi dana desa pada periode ke depan. Penatausahaannya pun harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Tidak hanya sistem, Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa pun harus memiliki kapabilitas dalam mengelola dana tersebut. Dengan adanya dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraannya. (BPKP, 2017).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Pasan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Pasan.

Tinjauan Pustaka

Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber-Sumber Keuangan Desa

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Jika diperkirakan pemerintah mampu menggelontorkan setiap desa sebanyak 10% dari total APBN, plus ADD sebesar 10% dari Pajak/Retribusi/DAU/DBH, ditambah Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah, maka setiap desa kemungkinan akan mengelola dana di atas 1 Milyar perdesa pada 72.944 desa di Indonesia.

Tujuan Otonomi Desa

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mngandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa. Perncanaa desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal) yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pemendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan

demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemandagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Sistem Informasi

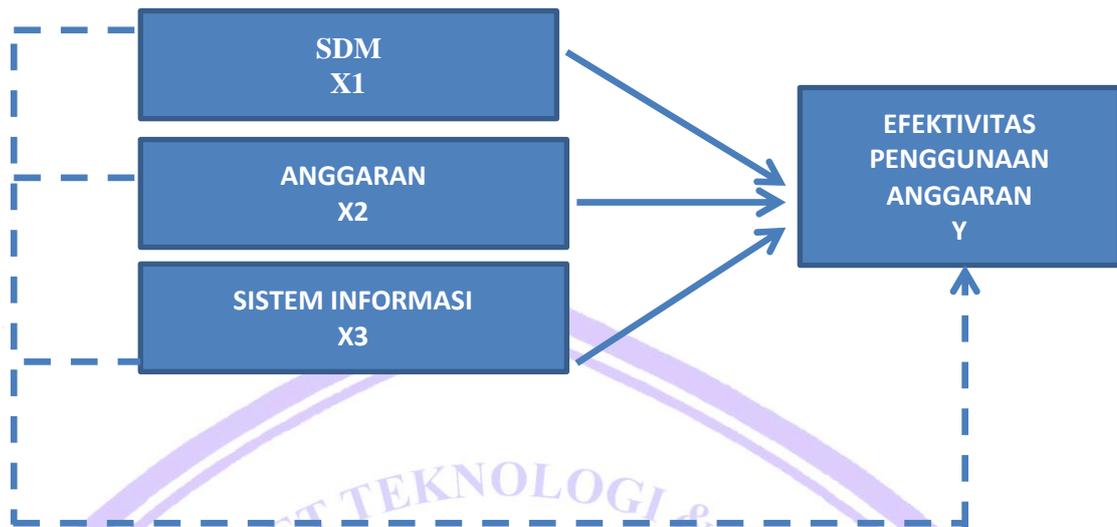
Sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Mengenai hirarki pengelompokkannya, dapat dikemukakan bahwa apabila suatu komponen di dalam suatu sistem membentuk sistem sendiri maka komponen ini dinamakan subsistem dan seterusnya sehingga akan ada nama-nama modul, submodul, aplikasi dan subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari jenjang manajerial manakah dimulainya. Menurut Tata S, Analisis Sistem Informasi (2003 : 10) :“Sistem adalah setiap kumpulan dari komponen atau sub-sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man power. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (work-ing age population) (Sumarsono, 2009).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

- pengaruh secara sendiri-sendiri
- - - pengaruh secara agregat/bersama-sama

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber asli melalui wawancara tanpa perantara. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari instansi yang relevan yakni badan pengelola keuangan dan aset daerah Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Sulawesi Utara, studi kasus pada Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Model ini digunakan untuk melihat pengaruh anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap efektivitas penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa di kecamatan pasan kabupaten Minahasa. seluruh perhitungan dalam pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

dimana :

Y_1 = Efektivitas Penggunaan Anggaran

X_1 = Anggaran

X_2 = SDM

- X₃ = Sistem Informasi
- a = Kostanta
- β₁ β₂ β₃ = koefisien regresi
- e = standart eror

Uji Kesesuaian (Test of Goodness of fit)

Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel.(Suliyanto.2011).

Untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus :

$$t_{hitung} = \beta_i / (Se(\beta_i)) \dots\dots\dots(3.2)$$

$$t_{tabel} = n-k-1 \dots\dots\dots(3.3)$$

Dimana :

- β₁ = koefisien regresi variabel independen ke-i
- Se = standar eror dari vaiabel independen ke-i
- N = jumlah data
- K = jumlah variable

Dalam pengujian ini mula-mula ditentukan hipotesis nol atau null hypotesis (Ho) yang menyatakan bahwa masing-masing variabel penjelas tidak berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan secara individu. Kemudian H1 yang menyatakan bahwa masing-masing variabel penjelas mempunyai pengaruh terhadap variabel yang menjelaskan secara individu.

Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut :

Anggaran – efektivitas penganggaran

H0 : β_i = 0 tidak ada pengaruh ada pengaruh anggaran dan efektivitas penganggaran

H1 : β_i ≠ 0 tidak ada pengaruh ada pengaruh anggaran dan efektivitas penganggaran

Sumber daya Manusia – Efektivitas penganggaran

H0 : β_i = 0 tidak ada pengaruh antara sumber daya manusia dan efektivitas penganggaran

H1 : β_i ≠ 0 ada pengaruh antara sumber daya manusia dan efektivitas penganggaran

Sistem informasi – efektivitas penganggaran

H0 : β_i = 0 tidak ada pengaruh ada pengaruh sistem informasi dan efektivitas penganggaran

H1 : β_i ≠ 0 ada pengaruh ada pengaruh sistem informasi dan efektivitas penganggaran

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (goodness of fit). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (fit) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan derajat kebebasan: df: α, (k-1), (n-k). Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus : (Suliyanto.2011)

Rumus nilai F hitung :

$$F = (R^2(k-1))/(((1-R^2))((n-k))) \dots\dots\dots(3.4)$$

- Dimana : F= Nilai F hitung
- R² = Koefisien determinasi
- N = Jumlah observasi

K = Jumlah variable

Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

Ho : $\beta_i = 0$ semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas secara bersama-sama

H1 : $\beta_i \neq 0$ semua variabel atau minimal salah satu variabel berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama

Ket : Dimana β_i terdiri dari $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2} \dots\dots\dots(3.5)$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R² yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya nilai R² yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linear klasik adalah bahwa varian setiap disturbance term yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Inilah yang disebut asumsi heteroskedasticity atau varian yang sama. Dalam heteroskedastisitas menunjukkan disturbance yang dapat ditunjukkan dengan adanya conditional variance Y_i bertambah pada waktu X bertambah. Dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau cross-sectional data). (Sumodiningrat.2007). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka dalam hal ini uji t dan uji F tidak lagi menjadi valid dan kurang kuat karena selang keyakinan akan semakin lebar. Autokorelasi mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan tidak efisien sehingga menjadi tidak dapat dilakukan.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regrasi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan kaidah “auxiliary regression”. Penggunaan kaidah ini dilakukan dengan cara meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain. Apabila hasil dari proses meregres masing-masing

variabel independen dengan variabel independen yang lain tersebut menunjukkan adanya nilai R2 yang lebih rendah dari R2 model utama, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pengujian Asumsi klasik
Multikolerasi**

Tabel 1 multikorelasi

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Anggaran	,968	1,033
Sumber daya manusia	,980	1,020
Sistem Informasi	,974	1,027

a. Dependent Variable: Efektivitas penganggaran

Sumber data : Pengolahan Data 2018

Dilihat dari tabel 1 Coefficients nilai VIF pada Output menunjukkan keberadaan *multikolinearitas*.

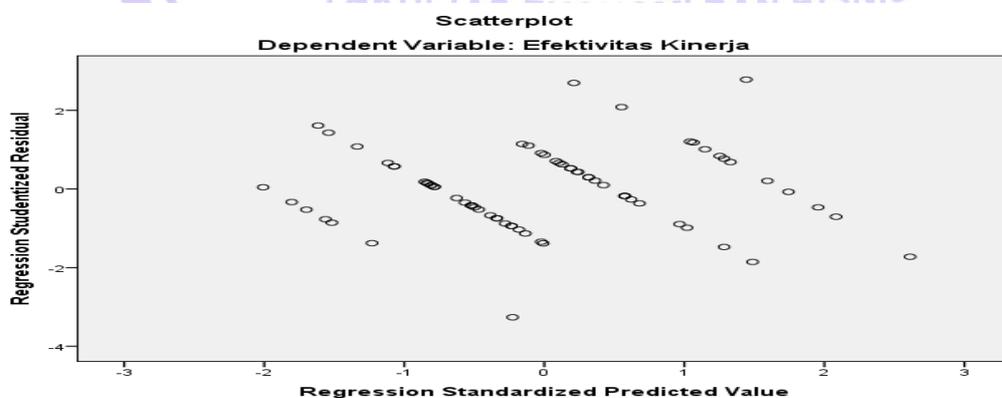
Bila VIF < 10,00 maka tidak terjadi gejala Multikolerasi

Bila VIF > 10,00 maka terjadi gejala Multikolerasi

Dengan Hasil :

- Nilai Tolerance : X1 Anggaran = 0,968
- : X2 Sumber Daya manusia = 0,980
- : X3 Sistem Informasi = 0,974
- Nilai VIF : X1 Anggaran = 1,033
- : X2 Sumber Daya Manusia = 1,020
- : X3 Sistem Informasi = 1,027

Diagram Uji Heterokedastisitas



Gambar 2 Kurva Uji Heterokedastisitas hasil Model Penelitian

Dari diagram diatas tersebut terlihat bahwa penyebaran residual tidak teratur. Hal tersebut terlihat pada plot yang terpancar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan yang biasa diambil adalah bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 2 Durbin Watson Model Summary^b

Model	Change Statistics			Durbin-Watson
	df1	df2	Sig. F Change	
1	3 ^a	71	,000	2,129

Sumber data : Pengolahan Data 2018

Pada analisis regresi terlihat bahwa nilai DW 2,129 mengindikasikan semakin mendekati angka dua dimana hal ini berarti bahwa titik durbin watson penelitian ini sudah sesuai dengan teori dan dapat digunakan.

Pengaruh secara langsung Variabel Independen Exogenus Anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap Variabel dependen Endogenus Efektivitas Penganggaran

Tabel 3 R-Square Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,876 ^a	,767	,758	,15240	,767	78,055

Sumber data : Pengolahan Data 2018

Dalam melihat pengaruh Variabel Independen Exogenus Anggaran, sumber daya manusia, dan sistem informasi secara gabungan terhadap variabel Dependen Endogenus Efektivitas penganggaran dapat dilihat pada Tabel 3 Model Summary diatas, pada nilai R square. Besarnya R square (R2) pada tabel diatas adalah 0,767. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya pengaruh Variabel independen exogenous anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap variabel dependen endogenus efektivitas penganggaran secara gabungan. Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R2 \times 100\%$$

$$KD = 0,767 \times 100\%$$

$$KD = 76,7 \%$$

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenus Anggaran sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas penganggaran secara gabungan adalah 76,7 %.

Dan pengaruh diluar model dapat di hitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,767$$

$$e = 0,233 \times 100\%$$

$$e = 23,3 \%$$

Yang berarti 23,3 % berarti besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang di teliti. Artinya besarnya pengaruh variabel independen ekxogenus anggaran, sumber daya manusia, dan sistem informasi terhadap variabel dependen endogenus efektivitas penganggaran adalah sebesar 76,7 %, sedangkan pengaruh sebesar 23,3 % disebabkan oleh variabel di luar model yang di teliti.

**Tabel 4 Uji Beta
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,073	,250		,292	,771
1 Anggaran	,381	,036	,618	10,627	,000
Sumber daya manusia	,233	,033	,410	7,082	,000
Sistem Informasi	,362	,036	,582	10,026	,000

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Anggaran dan Variabel Dependen Endogenus Efektivitas penganggaran

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenus anggaran terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas penganggaran. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 75 - (3+1) = 71$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1.666 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Anggaran terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas penganggaran ialah 10,627.

Hipotesis :

H_0 : Tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus anggaran terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas penganggaran.

H_1 : Ada Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus anggaran terhadap Variabel Dependen efektivitas penganggaran.

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan $< 0,05$ maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $10,627 > t$ tabel sebesar 1.666. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Anggaran terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas penganggaran. Maka Variabel Independen Exogenous anggaran berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous anggaran terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,618 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0.000 < 0,05$.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Sumber Daya Manusia dan Variabel Dependen Endogenous Efektivitas Penganggaran.

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenous Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 75 - (3+1) = 71$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1.666 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas penganggaran ialah 7,082

Hipotesis :

H_0 : Tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas penganggaran.

H_1 : Ada Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen efektivitas penganggaran.

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima
2. Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan $< 0,05$ maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $7,082 > t$ tabel sebesar 1.666. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas penganggaran. Maka Variabel Independen Exogenous sumber daya manusia berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,410 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0.000 < 0,05$.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Sistem Informasi dan Variabel Dependen Endogenous Efektivitas Penganggaran.

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenous Sistem Informasi terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 75 - (3+1) = 71$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1.666 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas penganggaran ialah 7,082

Hipotesis :

H0 : Tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas penganggaran.

H1 : Ada Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sistem informasi terhadap Variabel Dependen efektivitas penganggaran.

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan $< 0,05$ maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $10,026 > t \text{ tabel}$ sebesar 1.666. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Sistem Informasi terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas penganggaran. Maka Variabel Independen Exogenous Sistem Informasi berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous Sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas penganggaran diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,582 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0.000 < 0,05$.

Kelayakan Model Regresi

Untuk mengetahui model regresi yang telah dibuat sudah benar adalah dengan menggunakan pengujian dengan dua cara, yaitu Pertama menggunakan nilai F pada tabel keluaran ANOVA, dan Kedua dengan cara menggunakan nilai Probabilitas nilai Sig pada tabel 5 keluaran ANOVA.

Tabel 5
Tabel Kelayakan Model Regresi
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,438	3	1,813	78,055	,000 ^b
	Residual	1,649	71	,023		
	Total	7,087	74			

Sumber Data : Pengolahan Data 2018

Menghitung nilai F tabel dengan Ketentuan besar nilai taraf Signifikansi sebesar 0,05 dan Nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numerator / Vektor 1 : Jumlah Variabel – 1 atau $4 - 1 = 3$, dan dumerator / Vektor 2 : jumlah kasus-jumlah variabel atau $75 - 4 = 71$. Dengan ketentuan terdebut diperoleh angka F tabel sebesar 2,73.

Dengan kriteria pengambilan keputusan hasil pengujian hipotesis

Jika F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak, H₁ diterima.

Jika F hitung < F tabel, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.

Hasil uji hipotesis adalah :

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar $78,055 > F$ tabel sebesar 2,73. Dengan demikian H₀ ditolak, dan H₁ diterima. Artinya ada hubungan linier antara Variabel Independen Eksogenus anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi dengan Variabel Dependen Endogenus efektivitas penganggaran. Dengan nilai Sig 0,000 Kesimpulan adalah model regresi di atas sudah layak dan benar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan melalui alat analisis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penganggaran. Begitu juga secara parsial anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran, sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran dan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan efektif karena semua hasil berpengaruh signifikan.
2. Tanpa adanya anggaran desa maka kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan di desa akan sangat terbatas. Kemudian setelah tersediannya dana desa maka sumber daya manusia yang akan mengelola dan sistem informasi yang digunakanpun sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa oleh desa-desa di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi itu sendiri bisa menjadi hambatan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Pasan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada bagian sebelumnya maka saran-saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kontribusi sistem informasi, anggaran dan sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan anggaran maka perlu ada pemeliharaan terhadap hal ini, seperti pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, pemanfaatan sistem informasi yang ada dengan baik, serta alokasi anggaran yang dimiliki itu sendiri.
2. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel bebas pada penelitian ini dengan variabel-variabel lain yang memungkinkan relevan dalam pemanfaatan anggaran dana desa di kecamatan pasan, sehingga diharapkan nilai intersep yang merupakan nilai kontribusi dari variabel lainnya dapat lebih kecil dari variabel-variabel bebas atau variabel antara yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
- Stoner, James A.F. (2006). *Management*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.
- Sumaryadi,I Nyoman.(2005).*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta,Citra Utama. Hlm 24.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.hlm.82.
- Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 165.
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta. CV. Ciprui.hlm.7
- Juliantara, Dadang . 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.hlm.116.
- Ibid. Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Hlm. 166.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta. Hlm. 12.
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004.hlm. 12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.
- Subroto, Agus. (2000). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm 22.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18
- <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>. Diunduh pada pukul 11:01 tanggal 10 April 2018.

<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-dana-Desa.html> diunduh pada pukul 10:30 WIB 25 Maret 2018

<http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-15.htm> diakses pada pukul 13:56 tanggal 27 Maret 2018.

